



PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG

RENCANA KERJA PERUBAHAN APBD DISDAGPERINKOPUKM

TAHUN 2023

BEKERJA SEKARANG, BERSAMA, MAJU JAYA!

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya sehingga dokumen ini dapat diselesaikan sesuai rencana. Dokumen ini disusun sebagai salah satu kewajiban bagi Aparat Pemerintah Daerah (Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng) di dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Visi dan Misi yang harus mendapat perhatian secara terus menerus sepanjang masa, baik dalam jangka waktu pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Dokumen ini merupakan Rencana Kerja Perubahan APBD Tahun 2023 Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang tiada lain dimaksud untuk dapat mempersiapkan terwujudnya sistem pelaporan yang akuntabel terhadap instansi pemerintah yang ada di daerah sekaligus mempersiapkan organisasi pembelanjaan yang merupakan paradigma baru bagi birokrasi dengan pengembangan arus informasi dan teknologi yang terus berkembang. Dengan segala keterbatasan yang ada, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan APBD ini disadari masih terdapat hal-hal yang kurang sempurna, oleh karena itu dalam kesempatan ini kami sangat mengharapkan masukan dari semua pihak yang bersifat positif guna menyempurnakan lebih lanjut.

Akhinya kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan APBD Tahun 2023 ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Serta diharapkan semua pihak bisa bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Buleleng bisa berjalan sesuai dengan harapan.

Singaraja, Agustus 2023
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng

Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19741014 199311 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
BULELENG NOMOR.....
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SEMESTER I TAHUN 2023	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	22
2.4 <i>Review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD	26

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	44
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	45
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	45
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	45
3.3 Program dan Kegiatan	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	47
BAB V PENUTUP.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

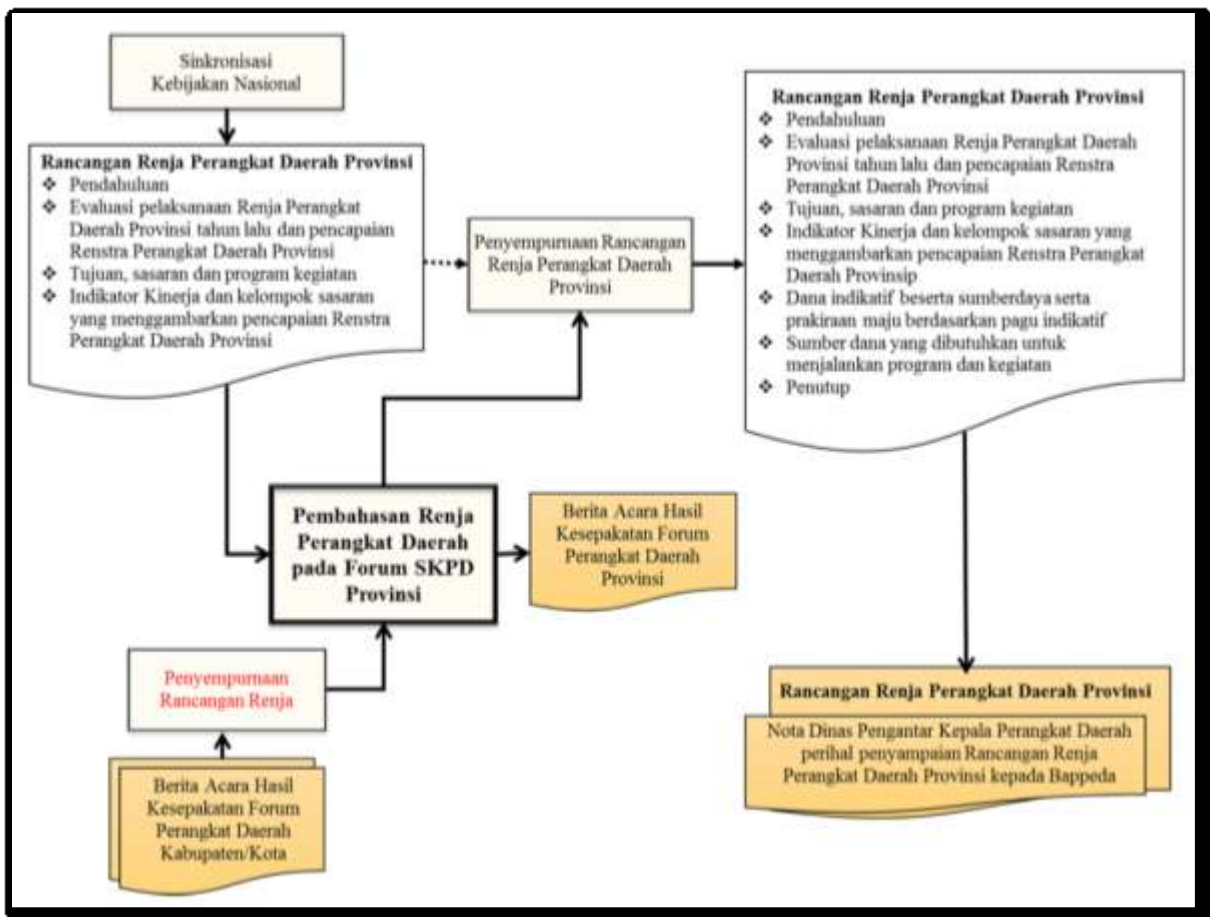
Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perubahan APBD adalah dokumen perencanaan yang disusun pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng untuk periode 1 (satu) tahun sebagai Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan APBD. RENJA Perubahan APBD pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- 1) RENJA Perubahan APBD merupakan dokumen perencanaan yang secara substansial merupakan terjemahan dan tindak lanjut dari Visi, Misi dari Kepala Daerah dan Program Organisasi Perangkat Daerah seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng.
- 2) RENJA Perubahan APBD (yang kemudian akan ditetapkan dalam KUA dan PPAS) merupakan acuan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dalam penyusunan Perencanaan Program Kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023.
- 3) RENJA Perubahan APBD merupakan salah satu instrumen perencanaan dan arah bagi pelaksanaan Program dan Kegiatan serta untuk menentukan sejauh mana capaian kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng pada Tahun bersangkutan, serta merupakan pencapaian dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA).

Mengingat arti strategis dokumen RENJA dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal penetapan dokumen RENJA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dalam perencanaan pembangunan yang akan dilakukan sudah tentu harus mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Bagi Pemerintah Daerah, reformasi pembangunan yang terjadi merupakan tonggak penting di dalam mengelola potensi yang dimiliki daerah. Sejalan dengan itu dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memungkinkan untuk menuangkan pandangan-pandangan pemimpin daerah ke dalam suatu perencanaan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yang akan digunakan sebagai dasar di dalam melaksanakan sistem pengelolaan daerah yang lebih baik.

Adapun bagan alur tahap penyusunan RENJA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:



Gambar 1.1 Alur Proses Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

(Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017)

Dengan menganalisis kondisi yang ada, mengacu berbagai referensi dan menetapkan kriteria seperti disebutkan di atas, maka RENJA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mengacu pada RPD Pemerintah Kabupaten Buleleng serta RENSTRA SKPD. Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng berperan sesuai dengan Tupoksi Dinas yaitu melaksanakan urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah dengan 2 (dua) sasaran, yaitu: Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah dan Stabilitas Harga Bahan Pokok Penting.

Untuk mencapai dan menindaklanjuti sasaran dimaksud, maka Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng perlu menyusun Perencanaan Strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng memerlukan integrasi antara keahlian

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/ kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi mewujudkan visi, misi dan strategis yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategik bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan RENJA pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017–2022.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan APBD ini adalah sebagai dokumen yang memberikan arah dan pedoman bagi pembangunan dan pengembangan di Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Selanjutnya Dokumen RENJA Perubahan APBD ini akan dijabarkan melalui penyusunan Program/Kegiatan yang diperlukan yang kemudian akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan APBD Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 adalah:

1. Sebagai acuan untuk merumuskan Program/Kegiatan Prioritas dan pedoman pelaksanaannya pada Tahun 2023.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Usulan Penganggaran pada Tahun Anggaran 2023 dengan mengakomodir Program/Kegiatan prioritas masing-masing Bidang pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adapun sistematika penulisan dari RENJADinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, meliputi:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASIRENJASKPDTAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SEMESTER I
TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD

Review atas RENJA SKPD berpedoman pada 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan tersebut serta capaian kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, maka dilakukan evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD Semester Pertama (I) Tahun 2023.

Evaluasi RENJA dijadikan dasar penyusunan RENJA Perubahan APBD Tahun 2023, dengan memperhatikan realisasi anggaran dan realisasi target capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Semester Pertama (I) yang mengacu pada APBD Tahun 2023.

Namun sehubungan dengan masih berjalannya tahun 2023, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng serta penyesuaian belanja berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada Semester Pertama (I) Tahun 2023. Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan pada Semester Kedua (II) Tahun 2023 tidak terlepas dari hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Semester Pertama dan Target RENSTRA Tahun 2023.

Berikut disajikan tabel hasil evaluasi pelaksanaan realisasi belanja pada semester pertama Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng:

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Semester I Tahun 2023 Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI			RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			KEUANGAN		KINERJA	
			Rp.	(%)	OUTPUT/ OUTCOME (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5+6)/2
2.17.01	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.147.964.235,00	4.406.133.488,00	43,42	46,22	44,82
2.17.01.2.01	1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	591.125.261,00	186.186.790,00	31,50	52,26	41,88
2.17.01.2.01.01	1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	389.265.301,00	97.615.690,00	25,08	53,33	39,21
2.17.01.2.01.06	1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	201.859.960,00	88.571.100,00	43,88	51,19	47,53
2.17.01.2.02	1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.427.767.027,00	3.606.866.275,00	48,56	50,00	49,28
2.17.01.2.02.01	1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.255.951.193,00	3.535.145.735,00	48,72	50,00	49,36
2.17.01.2.02.03	1.2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	171.815.834,00	71.720.540,00	41,74	50,00	45,87

KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI			RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			KEUANGAN		KINERJA	
			Rp.	(%)	OUTPUT/OUTCOME (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5+6)/2
2.17.01.2.05	1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	-	-	-	-
2.17.01.2.05.09	1.3.1 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	-	-	-	-
2.17.01.2.06	1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	619.418.650,00	98.370.600,00	15,88	49,31	32,59
2.17.01.2.06.01	1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	77.000.000,00	3.214.000,00	4,17	37,50	20,84
2.17.01.2.06.02	1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	274.836.000,00	-	-	-	-
2.17.01.2.06.04	1.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.282.650,00	63.208.000,00	52,99	58,33	55,66
2.17.01.2.06.06	1.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.600.000,00	3.003.000,00	45,50	75,00	60,25
2.17.01.2.06.08	1.4.5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	41.000.000,00	8.485.600,00	20,70	50,00	35,35
2.17.01.2.06.09	1.4.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.700.000,00	20.460.000,00	20,32	50,00	35,16

KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI			RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			KEUANGAN		KINERJA	
			Rp.	(%)	OUTPUT/OUTCOME (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5+6)/2
2.17.01.2.08	1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.241.372.433,00	461.357.035,00	37,17	50,00	43,58
2.17.01.2.08.01	1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	328.205.058,00	125.351.465,00	38,19	50,00	44,10
2.17.01.2.08.02	1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	307.416.000,00	96.316.519,00	31,33	50,00	40,67
2.17.01.2.08.03	1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	235.197.672,00	90.182.150,00	38,34	50,00	44,17
2.17.01.2.08.04	1.5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	370.553.703,00	149.506.901,00	40,35	50,00	45,17
2.17.01.2.09	1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.280.864,00	53.352.788,00	20,66	29,55	25,10
2.17.01.2.09.02	1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.750.000,00	18.870.788,00	17,84	38,64	28,24
2.17.01.2.09.10	1.6.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	122.930.864,00	34.482.000,00	28,05	25,00	26,52

KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI			RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			KEUANGAN		KINERJA	
			Rp.	(%)	OUTPUT/ OUTCOME (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5+6)/2
2.17.01.2.09.11	1.6.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.600.000,00	-	-	-	-
2.17.02	2 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	77.400.000,00	25.944.280,00	33,52	51,11	42,32
2.17.02.2.01	2.1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	77.400.000,00	25.944.280,00	33,52	51,11	42,32
2.17.02.2.01.01	2.1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor KasKoperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	77.400.000,00	25.944.280,00	33,52	51,11	42,32
2.17.03	3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	67.124.579,00	22.859.080,00	34,05	49,33	41,69
2.17.03.2.01	3.1 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	67.124.579,00	22.859.080,00	34,05	49,33	41,69

KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI			RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			KEUANGAN		KINERJA	
			Rp.	(%)	OUTPUT/ OUTCOME (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5+6)/2
	Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					
2.17.03.2.01.01	3.1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	67.124.579,00	22.859.080,00	34,05	49,33	41,69
2.17.04	4 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	59.000.000,00	23.057.480,00	39,08	49,33	44,21
2.17.04.2.01	4.1 Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.000.000,00	23.057.480,00	39,08	49,33	44,21
2.17.04.2.01.01	4.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	59.000.000,00	23.057.480,00	39,08	49,33	44,21
2.17.05	5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	274.170.000,00	36.852.500,00	13,44	52,78	33,11

KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI			RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			KEUANGAN		KINERJA	
			Rp.	(%)	OUTPUT/ OUTCOME (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5+6)/2
2.17.05.2.01	5.1 Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	274.170.000,00	36.852.500,00	13,44	52,78	33,11
2.17.05.2.01.01	5.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	274.170.000,00	36.852.500,00	13,44	52,78	33,11
2.17.06	6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	129.283.250,00	33.410.670,00	25,84	48,33	37,09
2.17.06.2.01	6.1 Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	129.283.250,00	33.410.670,00	25,84	48,33	37,09
2.17.06.2.01.01	6.1.1 Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	129.283.250,00	33.410.670,00	25,84	48,33	37,09

KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI			RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			KEUANGAN		KINERJA	
			Rp.	(%)	OUTPUT/OUTCOME (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5+6)/2
2.17.07	7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	427.117.070,00	111.824.890,00	26,18	48,77	37,47
2.17.07.2.01	7.1 Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	427.117.070,00	111.824.890,00	26,18	48,77	37,47
2.17.07.2.01.01	7.1.1 Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	95.999.828,00	37.920.220,00	39,50	49,33	44,42
2.17.07.2.01.02	7.1.2 Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	111.741.690,00	39.723.750,00	35,55	50,00	42,77
2.17.07.2.01.03	7.1.3 Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	29.375.552,00	13.394.540,00	45,60	49,33	47,47
2.17.07.2.01.05	7.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	54.000.000,00	20.786.380,00	38,49	49,33	43,91
2.17.07.2.01.06	7.1.6 Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	136.000.000,00	-	-	-	-

KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI			RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			KEUANGAN		KINERJA	
			Rp.	(%)	OUTPUT/ OUTCOME (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5+6)/2
2.17.08	8 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.074.534.398,00	60.258.620,00	5,61	49,33	27,47
2.17.08.2.01	8.1 Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.074.534.398,00	60.258.620,00	5,61	49,33	27,47
2.17.08.2.01.01	8.1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.074.534.398,00	60.258.620,00	5,61	49,33	27,47
3.30.02	9 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	78.109.408,00	24.882.880,00	31,86	51,11	41,48
3.30.02.2.02	9.1 Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	78.109.408,00	24.882.880,00	31,86	51,11	41,48
3.30.02.2.02.01	9.1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	78.109.408,00	24.882.880,00	31,86	51,11	41,48
3.30.03	10 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	606.253.750,00	41.044.120,00	6,77	50,35	28,56

KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI			RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			KEUANGAN		KINERJA	
			Rp.	(%)	OUTPUT/ OUTCOME (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5+6)/2
	PERDAGANGAN					
3.30.03.2.02	10.1 Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	606.253.750,00	41.044.120,00	6,77	50,35	28,56
3.30.03.2.02.01	10.1.1 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	606.253.750,00	41.044.120,00	6,77	50,35	28,56
3.30.04	11 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	169.375.000,00	63.248.090,00	37,34	50,00	43,67
3.30.04.2.01	11.1 Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	151.375.000,00	62.145.340,00	41,05	50,00	45,53
3.30.04.2.01.01	11.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	151.375.000,00	62.145.340,00	41,05	50,00	45,53
3.30.04.2.02	11.2 Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	18.000.000,00	1.102.750,00	6,13	50,00	28,06

KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI			RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			KEUANGAN		KINERJA	
			Rp.	(%)	OUTPUT/ OUTCOME (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5+6)/2
	di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					
3.30.04.2.02.01	11.2.1 Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	18.000.000,00	1.102.750,00	6,13	50,00	28,06
3.30.06	12 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	364.302.552,00	124.780.118,00	34,25	48,62	41,44
3.30.06.2.01	12.1 Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	297.684.790,00				98,37
3.30.06.2.01.01	12.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	215.158.790,00				
3.30.06.2.01.02	12.1.2 Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	82.526.000,00				
3.30.07	13 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	303.703.270,00	64.826.288,00	21,35	53,57	37,46

KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI			RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			KEUANGAN		KINERJA	
			Rp.	(%)	OUTPUT/ OUTCOME (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5+6)/2
3.30.07.2.01	13.1 Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	303.703.270,00	64.826.288,00	21,35	53,57	37,46
3.30.07.2.01.01	13.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	303.703.270,00	64.826.288,00	21,35	53,57	37,46
3.31.02	14 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	368.696.185,00	96.895.788,00	26,28	53,75	40,02
3.31.02.2.01	14.1 Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	368.696.185,00	96.895.788,00	26,28	53,75	40,02
3.31.02.2.01.03	14.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	281.500.002,00	46.840.838,00	16,64	50,00	33,32
3.31.02.2.01.05	14.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	87.196.183,00	50.054.950,00	57,40	57,50	57,45

KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI			RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			KEUANGAN		KINERJA	
			Rp.	(%)	OUTPUT/ OUTCOME (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5+6)/2
3.31.03	15 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	68.855.000,00	15.342.550,00	22,28	50,00	36,14
3.31.03.2.01	15.1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	68.855.000,00	15.342.550,00	22,28	50,00	36,14
3.31.03.2.01.01	15.1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	68.855.000,00	15.342.550,00	22,28	50,00	36,14
JUMLAH PROGRAM :	15					
JUMLAH KEGIATAN :	20					
JUMLAH SUB KEGIATAN :	35					
JUMLAH TOTAL		14.215.888.697,00	5.151.360.842,00	36,24	50,17	43,21

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, serta indikator kinerja RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Dalam Bab ini juga memuat indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian RENSTRA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Hasil analisis disajikan pada bagian ini dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (Tahun n-3)	Tahun 2018 (Tahun n-2)	Tahun 2019 (Tahun n-1)	Tahun 2020 (Tahun n)	Tahun 2017 (Tahun n-3)	Tahun 2018 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n+1)	Tahun 2022 (Tahun n+2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	-	-	74,29%	74,74%	75,29%	75,94%	74,29%	75,00%	76,79%	82,00%	-
2	Persentase Kelompok Binaan yang Berhasil	-	-	70,00%	73,00%	76,00%	79,00%	70,00%	73,02%	77,74%	85,00%	-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Sejalan dengan paradigma pendekatan pelayanan kemasyarakatan dan kelembagaan SKPD yang menangani masalah ekonomi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sebelumnya telah beberapa kali mengalami perubahan nama maupun struktur organisasi dan terakhir diberi nama Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi yaitu perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati. Dalam mengimplementasikan Tupoksi dimaksud telah dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pembangunan. Program dan kegiatan tersebut antara lain yang berkaitan dengan upaya promosi produk unggulan daerah, merevitalisasi pasar-pasar desa termasuk pengawasan terhadap peredaran barang dan Kemetrolagian Daerah, pelatihan kewirausahaan, dan bimtek perkoperasian.

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng antara lain:

1. Masih rendahnya kesadaran wajib tera untuk menera dan tera ulang UTTP yang dimiliki.
2. Peralatan pelayanan untuk bidang kemetrolagian sangat mahal dan jumlahnya terbatas.
3. Masih Rendahnya Tingkat Kesadaran Konsumen serta belum optimalnya pengawasan barang/jasa.

4. Masih adanya pasar dalam keadaan rusak dan menurunnya minat masyarakat terhadap pasar tradisional akibat tingginya jumlah pasar modern atau supermarket.
5. Luasnya wilayah di Kabupaten Buleleng secara tidak langsung mengundang bagi PKL dari luar wilayah Kabupaten Buleleng, sehingga banyak PKL yang berjualan tidak pada zonasinya.
6. Belum Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas terkait dengan Urusan Perdagangan.
7. Kurangnya wawasan perajin dalam penerapan teknologi modern.
8. Belum adanya penguatan kelembagaan sentra-sentra industri.
9. Masih banyaknya produk unggulan IKRT/IKM yang belum dikenal di pasaran
10. Masih terbatasnya sarana dan prasarana,
11. Kurangnya kemampuan Koperasi dan UMKM dalam mengelola usahanya, mengakses permodalan dan menerapkan teknologi.

Identifikasi isu lingkungan strategis sangatlah menentukan dalam rangka mewujudkan tujuan maupun sasaran pembangunan. Berikut ini akan diuraikan identifikasi isu-isu strategis berdasarkan faktor internal dan eksternal Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

1. Faktor Internal

Faktor internal yang bersumber dari dalam organisasi dan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat berupa kekuatan (*strengths*) dan ada yang berupa kelemahan (*weaknesses*). Faktor kekuatan dan kelemahan dimaksud teridentifikasi sebagai berikut:

1. Faktor Kekuatan (*strengths*)

Isu strategis yang merupakan faktor kekuatan merupakan faktor pendukung dan pemicu dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja SKPD. Adapun faktor kekuatan yang ada di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah mencakup:

- a. Tersedianya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas.

- b. Adanya kerjasama antar staf yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas.
- c. Tersedianya sumberdaya manusia dalam pelaksanaan tugas.
- d. Adanya dukungan dana pembangunan dari APBD Kabupaten Buleleng.
- e. Tersedianya Peraturan perundang-undangan sebagai pendukung pelaksanaan Tupoksi (Perda).

2. Faktor Kelemahan

Faktor Kelemahan yang menjadi kendala/penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja SKPD Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng adalah:

- a. Kapasitasnya/pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia masih perlu ditingkatkan.
- b. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam mendukung kinerja pelayanan masih perlu peningkatan.
- c. Lemahnya akses Pemasaran dan akses Permodalan Koperasi dan UKM.

2. Faktor Eksternal

Disamping faktor internal, faktor eksternal juga berpengaruh terhadap kinerja pencapaian tujuan dan sasaran SKPD Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Identifikasi faktor eksternal ada yang berupa peluang (*Opportunities*) dan ada yang berupa ancaman (*Threats*). Adapun faktor peluang dan faktor ancaman dimaksud adalah:

1. Faktor Peluang (*Opportunities*)

Isu strategis faktor peluang merupakan isu strategis yang berasal dari luar SKPD yang memberikan dorongan/dukungan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Adapun Isu strategis yang merupakan factor peluang adalah:

- a. Adanya jalinan koordinasi yang sangat mantap dari berbagai SKPD terkait dalam penanganan masalah kesejahteraan.

- b. Adanya Partisipasi lembaga perbankan dan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah permodalan bagi UMKM;
- c. Adanya pedoman ataupun kebijakan dari pemerintah atasan (Provinsi Bali, Pusat/kementerian) yang menjadi pegangan dalam penanganan masalah Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sehingga penanganannya menjadi lebih jelas, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah, baik Dari APBD Provinsi Bali maupun APBN (DAK).

2. Faktor Ancaman (*Treaths*)

Isu strategis yang merupakan faktor ancaman adalah merupakan isu strategis yang berasal dari luar SKPD yang menjadi kendala/ancaman atau tantangan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja SKPD Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Adapun faktor ancaman dimaksud adalah:

- a. Semangat kewirausahaan masyarakat kurang berkembang;
- b. Potensi daerah belum dikelola dengan baik;
- c. Kesadaran Masyarakat untuk berusaha yang sehat masih kurang
- d. Sistem pengembangan daerah yang belum terintegrasi;
- e. Pasar bebas memunculkan iklim usaha yang sangat kompetitif;

Walaupun telah mendapat dukungan penganggaran dari pemerintah dan adanya koordinasi yang mantap dalam pelaksanaannya, namun permasalahan tetap saja muncul sejalan dengan kompleksitas dan dinamisnya perkembangan perekonomian. Adapun isu strategis yang telah teridentifikasi yang berkaitan dengan masalah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng antara lain:

- a. Globalisasi Ekonomi, ditandai liberalisasi ekonomi. menuntut perkuatan sektor ekonomi khususnya yang dikelola masyarakat. (liberalisasi ekonomi).

- b. Pertumbuhan ekonomi didominasi sektor konsumsi daripada produksi, kurang berdampak pada gerak sektor riil/usaha rakyat. Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih melambat (**Paradoks ekonomi**).
- c. UMKM Buffer Ekonomi Nasional, terbukti menjadi katup pengaman saat krisis ekonomi. Daya saing UMKM masih relatif rendah serta keberpihakan kebijakan Pro-UMKM masih perlu dioptimalkan (**UMKM Buffer Stock Ekonomi**).
- d. Tata kelola nilai koperasi yakni kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong, sesuai jati dirinya belum sepenuhnya diimplementasikan dalam membangkitkan trust koperasi guna mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat (**Trust Koperasi**).
- e. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam tata kelola bisnis pelaku UMKM guna menghadapi persaingan terbuka/pasar global masih belum memadai (**Akses IT**).

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Penyusunan Rancangan RENJA Perubahan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan RENJA Perubahan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Dinas saat ini.

Telaahan terhadap Rancangan Perubahan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RENSTRA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas dengan memperhatikan prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD. *Review* terhadap Rancangan Perubahan RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan

kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

Tabel T-C.31.

Review terhadap Capaian Kinerja dalam RENJA INDUK Tahun 2023

Kabupaten Buleleng

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Buleleng

Lembar dari

No	Rencana Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Buleleng	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	10.053.453.332	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	9,804,766,670	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Buleleng	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	28 laporan	595.781.261	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Buleleng	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	28 laporan	487,997,715	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	393.921.301	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	305,424,767	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28 laporan	201.859.960	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28 laporan	182,572,948	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Buleleng	Persentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	7.422.102.738	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Buleleng	Persentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	7,189,241,247	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Buleleng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	576 orang/ bulan	7.250.286.904	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Buleleng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	576 orang/ bulan	6,996,842,509	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	171.815.834	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	192,398,738	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Buleleng	Persentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur	100%	10.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Buleleng	Persentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur	100%	10.000.000	
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Buleleng	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	2 orang	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Buleleng	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	2 orang	10.000.000	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pelatihan					Pelatihan			
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Buleleng	Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur	100%	619.418.650	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Buleleng	Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur	100%	541,934,075	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Buleleng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	77.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Buleleng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	26,987,775	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Buleleng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	274.836.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Buleleng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	275,424,300	
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Buleleng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	119.282.650	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Buleleng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	126,065,700	
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 dokumen	6.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 dokumen	7,179,500	
1.4.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	41.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	43,752,800	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	100.700.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	62,524,000	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Buleleng	Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur	100%	1.235.800.683	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Buleleng	Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur	100%	1,187,177,961	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	328.205.058	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	306,605,058	
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	302.760.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	310,760,000	
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	227.772.600	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	255,259,200	
1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	377.063.025	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 laporan	314,553,703	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			yang Disediakan					Disediakan			
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Buleleng	Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur	100%	170.350.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Buleleng	Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur	100%	388,415,672	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Buleleng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 unit	105.750.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Buleleng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 unit	245,004,000	
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Buleleng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	35.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Buleleng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	113,811,672	
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Buleleng	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	29.600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Buleleng	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	29,600,000	
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN	Kabupaten	Persentase usaha simpan	1,9%	77.400.000	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN	Kabupaten	Persentase usaha simpan	1,9%	77,400,000	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PINJAM	Buleleng	pinjam berizin			PINJAM	Buleleng	pinjam berizin			
2.1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	- Persentase koperasi yang memiliki Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam (SIUSP)	69,04%	77.400.000	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	- Persentase koperasi yang memiliki Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam (SIUSP)	69,04%	77,400,000	
2.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 unit usaha	77.400.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 unit usaha	77,400,000	
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kabupaten Buleleng	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	36,76%	67.124.579	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kabupaten Buleleng	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	36,76%	67,124,579	
3.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Kabupaten Buleleng	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa	50 koperasi	67.124.579	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Kabupaten Buleleng	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa	50 koperasi	67,124,579	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					
3.1.1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 unit usaha	67.124.579	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 unit usaha	67,124,579	
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kabupaten Buleleng	Persentase koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam sehat	6,1%	59.000.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kabupaten Buleleng	Persentase koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam sehat	6,1%	59.000.000	
4.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah koperasi naik kelas/kriteria	50 koperasi	59.000.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah koperasi naik kelas/kriteria	50 koperasi	59.000.000	
4.1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	50 unit usaha	59.000.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	50 unit usaha	59.000.000	

No	Rencana Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kabupaten Buleleng	Persentase Sumber Daya Manusia koperasi terlatih	100%	274.170.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kabupaten Buleleng	Persentase Sumber Daya Manusia koperasi terlatih	100%	280,665,065	
5.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah pengurus/pengawas yang mampu mengelola koperasi dengan baik	90 orang	274.170.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah pengurus/pengawas yang mampu mengelola koperasi dengan baik	90 orang	280,665,065	
5.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten Buleleng	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	90 orang	274.170.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten Buleleng	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	90 orang	280,665,065	
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kabupaten Buleleng	Persentase koperasi aktif dan sehat	17%	129.283.250	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kabupaten Buleleng	Persentase koperasi aktif dan sehat	17%	119,383,250	
6.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam	Kabupaten Buleleng	Jumlah koperasi yang mengalami peningkatan dari sisi kelembagaan dan usaha	20 koperasi	129.283.250	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam	Kabupaten Buleleng	Jumlah koperasi yang mengalami peningkatan dari sisi kelembagaan dan usaha	20 koperasi	119,383,250	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daerah Kabupaten/ Kota					Daerah Kabupaten/ Kota					
6.1.1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	20 orang	129.283.250	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	20 orang	119,383,250	
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kabupaten Buleleng	Persentase UMKM yang Formal	26%	427.117.070	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kabupaten Buleleng	Persentase UMKM yang Formal	26%	453,802,327	
7.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kabupaten Buleleng	Jumlah Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Buleleng	270 UMKM	427.117.070	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kabupaten Buleleng	Jumlah Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Buleleng	270 UMKM	453,802,327	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.1.1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Buleleng	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	25 unit usaha	95.999.828	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Buleleng	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	25 unit usaha	126,779,368	
7.1.2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kabupaten Buleleng	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	50 unit usaha	111.741.690	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kabupaten Buleleng	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	50 unit usaha	88,664,990	
7.1.3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kabupaten Buleleng	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	50 unit usaha	29.375.552	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kabupaten Buleleng	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	50 unit usaha	29,012,552	
7.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kabupaten Buleleng	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	50 orang	54.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kabupaten Buleleng	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	50 orang	73,346,250	
7.1.5	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan	Kabupaten Buleleng	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	60 orang	136.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan	Kabupaten Buleleng	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	60 orang	135,999,167	

No	Rencana Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kewirausahaan					Kewirausahaan					
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kabupaten Buleleng	Persentase UMKM naik kelas	1,6%	577.771.012	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kabupaten Buleleng	Persentase UMKM naik kelas	1,6%	1,028,007,398	
8.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Kabupaten Buleleng	Jumlah UMKM yang bermitra dengan lembaga keuangan dan lembaga bisnis lainnya	50 UMKM	577.771.012	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Kabupaten Buleleng	Jumlah UMKM yang bermitra dengan lembaga keuangan dan lembaga bisnis lainnya	50 UMKM	1,028,007,398	
8.1.1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kabupaten Buleleng	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	50 unit usaha	577.771.012	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kabupaten Buleleng	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	50 unit usaha	1,028,007,398	
9	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kabupaten Buleleng	Persentase pemenuhan perizinan perusahaan perdagangan	82%	78.109.408	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kabupaten Buleleng	Persentase pemenuhan perizinan perusahaan perdagangan	82%	63,825,408	
9.1	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kabupaten Buleleng	Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi Tanda Daftar Gudang (TDG)	30 TDG	78.109.408	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kabupaten Buleleng	Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi Tanda Daftar Gudang (TDG)	30 TDG	63,825,408	
9.1.1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	15 dokumen	78.109.408	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	15 dokumen	63,825,408	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kabupaten Buleleng	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas	82%	106.253.750	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kabupaten Buleleng	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas	82%	594,611,750	
10.1	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kabupaten Buleleng	Jumlah pengelola sarana distribusi yang dibina	230 orang	106.253.750	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kabupaten Buleleng	Jumlah pengelola sarana distribusi yang dibina	230 orang	594,611,750	
10.1.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Buleleng	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	47 dokumen	106.253.750	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Buleleng	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	47 dokumen	594,611,750	
11	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kabupaten Buleleng	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100%	169.375.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kabupaten Buleleng	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100%	169,375,000	
11.1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah monev/pemantauan ketersediaan barang pokok dan barang penting yang sesuai ketentuan	12 Laporan	151.375.000	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah monev/pemantauan ketersediaan barang pokok dan barang penting yang sesuai ketentuan	12 Laporan	151,375,000	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	151.375.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	151,375,000	
11.2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Kabupaten Buleleng	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	12 Laporan	18.000.000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Kabupaten Buleleng	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	12 Laporan	18.000.000	
11.2.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	18.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	18.000.000	
12	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kabupaten Buleleng	Persentase UTTP patuh tera ulang	82%	344.178.237	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kabupaten Buleleng	Persentase UTTP patuh tera ulang	82%	353,305,553	
12.1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang,	Kabupaten Buleleng	Jumlah UTTP yang ditera ulang	10.000 unit	344.178.237	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang,	Kabupaten Buleleng	Jumlah UTTP yang ditera ulang	10.000 unit	353,305,553	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Pengawasan					dan Pengawasan					
12.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Kabupaten Buleleng	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	10.000 unit	246.153.498	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Kabupaten Buleleng	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	10.000 unit	262,000,813	
12.1.2	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kabupaten Buleleng	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	30 orang	98.024.739	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kabupaten Buleleng	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	30 orang	91,304,740	
13	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kabupaten Buleleng	Persentase kemitraan UMKM	100%	303.703.270	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kabupaten Buleleng	Persentase kemitraan UMKM	100%	260,315,260	
13.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kabupaten Buleleng	Jumlah pengerajin yang sudah dipromosikan produknya	35 Pengerajin	303.703.270	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kabupaten Buleleng	Jumlah pengerajin yang sudah dipromosikan produknya	35 Pengerajin	260,315,260	
13.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	35 UMKM	303.703.270	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	35 UMKM	260,315,260	
14	PROGRAM PERENCANAAN DAN	Kabupaten	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Pada	78,14%	333.349.681	PROGRAM PERENCANAAN DAN	Kabupaten	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Pada	78,14%	843,266,731	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PEMBANGUNAN INDUSTRI	Buleleng	PDRB			PEMBANGUNAN INDUSTRI	Buleleng	PDRB			
14.1	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Kabupaten Buleleng		1 Dokumen	333.349.681	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Kabupaten Buleleng		1 Dokumen	843,266,731	
14.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	246.153.498	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	691,070,548	
14.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	87.196.183	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	152,196,183	
15	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Kabupaten Buleleng	Persentase Perijinan dan Ketersediaan Data IKM	82%	68.855.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Kabupaten Buleleng	Persentase Perijinan dan Ketersediaan Data IKM	82%	68,855,000	
15.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri	Kabupaten Buleleng	Jumlah IKM	55 IKM	68.855.000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri	Kabupaten Buleleng	Jumlah IKM	55 IKM	68,855,000	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	(IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)					(IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)						
15.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	68.855.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	68,855,000		
TOTAL			14.215.888.697			TOTAL			14.243.703.991			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat, dilakukan penyesuaian dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku. Kemudian dilakukan penelitian kelengkapan informasi dari usulan, terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan, bila perlu dilakukan konfirmasi atau diberi catatan untuk dikonfirmasi dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Mengingat alur usulan Program/Kegiatan berasal dari teknokratik, *bottom up*, maupun politis maka sudah seharusnya Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mengakomodir usulan dari masyarakat melalui musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD jika sesuai dengan Program/Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas. Sesuai dengan hasil Musrenbang Kabupaten Tahun 2023 dan menyesuaikan dengan Tupoksi Dinas, maka Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mengakomodir usulan masyarakat dalam RENJA Perubahan APBD Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

Adapun usulan dan hasil Musrenbang Kabupaten Tahun 2023 yang dapat diakomodir oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sesuai dengan isu penting dan tupoksi Dinas, yakni Permohonan Bantuan Sarana Prasarana Kelompok Penjahit Sekar Wangi yang beralamat di Banjar Dinas Kalisada, Desa Kalisada, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng; Kelompok Tenun Jinengdalem di Banjar Dinas Tingkih Kerep, Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan Kelompok Usaha Bersama Bukit Sakti di Banjar Dinas Bukit Sakti, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam mengembangkan atau melaksanakan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi pembangunan.

Penetapan kebijakan akan dapat mengarahkan pada kondisi dimana seluruh elemen mengetahui tentang apa peran dan tanggungjawab masing-masing elemen dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng menetapkan kebijakan-kebijakan melalui rencana strategis daerah sebagai berikut:

1. Pengembangan sentra-sentra industri pengolahan masyarakat dan Kawasan industri;
2. Fasilitasi penguatan kelembagaan UMKM;
3. Fasilitasi penguatan kelembagaan koperasi;
4. Meningkatkan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal; dan
5. Pengendalian ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan barang penting.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rangka melaksanakan tupoksi Dinas serta untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, maka disusun dan dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Mencermati dari tugas pokok serta rumusan visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng menetapkan tujuan dan sasaran dalam 1 (satu) Tahun ke depan.

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng untuk mengantisipasi isu-isu penting yang telah diuraikan diatas adalah Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing. Sementara Sasaran yang ingin dicapaik yakni:

1. Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah;
2. Stabilisasi Harga Bahan Pokok Penting

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk dapat mencapai tujuan, sasaran dan program/kegiatan diperlukan langkah-langkah strategis yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta karekteristik wilayah dan masyarakatnya. Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng secara bertahap dan berkesinambungan terus berupaya meningkatkan penanganan masalah ekonomi melalui berbagai program dan kegiatan sesuai Tupoksi Dinas.

Berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dalam pembangunan daerah Kabupaten Buleleng, maka Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2023 telah merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2023.

Program dan kegiatan tersebut merupakan hasil penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah merupakan faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, karena program yang dirumuskan harus dapat mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pada bagian ini dijelaskan tentang gambaran umum RENJA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023. Secara umum Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng akan menyelenggarakan 15 Program yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
 - a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 3. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
 - a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota
- 4. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
 - a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota
- 5. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
 - a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
- 6. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
 - a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan

Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi
Kewenangan Kabupaten/ Kota

7. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
 - a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - 1) Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - 2) Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - 3) Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
 - 4) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
 - 5) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan
8. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
 - a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
 - 1) Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
9. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
 - a. Penerbitan Tanda Daftar Gudang
 - 1) Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
10. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
 - a. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 - 1) Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
11. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
 - a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - b. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota

- 1) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota
12. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
- a. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
 - 1) Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang
 - 2) Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal
13. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
- a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - 1) Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota
14. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
- a. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
 - 2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
15. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
- a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

BAB V

PENUTUP

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan APBD Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program/kegiatan pada Rencana Kerja (RENJA) Perubahan APBD Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi-UKM.
2. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebanyak 15 program yang terdiri dari 21 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Dengan rincian:
 - a. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah terdiri dari 7 program, 8 kegiatan, dan 21 sub kegiatan.
 - b. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan terdiri dari 5 program, 6 kegiatan dan 7 sub kegiatan.
 - c. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian terdiri dari 2 program, 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan.
 - d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 program, 6 kegiatan dan 18 sub kegiatan adalah penunjang/rutin sekretariat.
 - e. Jumlah kebutuhan dana dalam pelaksanaan Program/Kegiatan RENJA Perubahan APBD Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 secara total sebesar Rp.14.243.703.991,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Buleleng.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan APBD Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 merupakan acuan bagi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Buleleng dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap para pelaku dunia usaha di wilayah Kabupaten Buleleng dengan mengacu sesuai dengan RPD dan RENSTRA yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Perubahan APBD Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 ini dapat digunakan dalam melaksanakan tugas dengan baik, rutin maupun pembangunan sektor industri dan perdagangan sebagai arahan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Tentu saja banyak hal yang perlu ditingkatkan dalam rangka pembinaan terhadap para pelaku dunia usaha di wilayah Kabupaten Buleleng seperti pendanaan penambahan sarana dan prasarana yang memadai.

Demikianlah sekilas Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 yang dapat kami susun. Rencana Kerja ini sudah barang tentu belum mampu menjangkau semua kebutuhan pembangunan dan belum mampu mengakomodasi semua usulan yang muncul dalam musrenbang kecamatan secara sekaligus. Oleh karena itu, program pembangunan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan serta akan menyesuaikan dengan skala prioritas dan kondisi kemampuan keuangan Daerah. Kendati demikian kami berharap mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk pembangunan.